

Laporan Akhir Hasil Penelitian TA.2015

**KAJIAN KEBIJAKAN AKSELERASI
PEMBANGUNAN PERTANIAN WILAYAH
TERTINGGAL MELALUI PENINGKATAN
KAPASITAS PETANI**



SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS

Tim Peneliti:

**Kurnia Suci Indraningsih
Dewa Ketut Sadra Swastika
Muhammad Iqbal
Bambang Prasetyo
Askaria Milindri
Wini Nahraeni**

**PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015**

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENDAHULUAN

Latar Belakang

1. Kondisi SDM petani di wilayah tertinggal terdapat kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi di lapangan. Kesenjangan lebih signifikan terjadi antardaerah. Salah satu penyebab timbulnya kesenjangan antardaerah adalah bias dan distorsi pembangunan yang lebih banyak tertuju pada daerah-daerah yang aksesibilitasnya sudah baik, terutama daerah perkotaan. Dalam upaya memacu pembangunan dari sisi aspek sosial dan ekonomi di daerah tertinggal, maka program pembangunan pedesaan harus memprioritaskan tiga aspek utama, yaitu: (1) peningkatan ekonomi rakyat untuk mengentaskan kemiskinan, (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan (3) pembangunan infrastruktur.

Tujuan Penelitian

2. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi karakteristik desa dan profil petani di wilayah tertinggal; (2) menganalisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan kapasitas petani dalam merespons berbagai perubahan lingkungan usaha tani; serta (3) merumuskan strategi peningkatan kapasitas petani untuk mengakselerasi pembangunan pertanian di wilayah tertinggal.

Metodologi

3. Lokasi penelitian mencakup wilayah Jawa (Kabupaten Garut dan Sukabumi Provinsi Jawa Barat) dan Luar Jawa (Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan). Responden dalam kegiatan penelitian ini adalah: (1) pimpinan lembaga lembaga penentu kebijakan, lembaga pelayanan yang terkait dengan bidang kajian dari pusat sampai daerah (pusat, provinsi, dan kabupaten); (2) informan kunci (kontak tani, aparat pemerintah, penyuluh swasta, dan lain-lain); (3) kelompok tani; (4) penyuluh; dan (5) petani (120 responden), dengan jumlah responden sebanyak 163. Analisis data dalam penelitian ini mencakup: (1) deskriptif eksplanatif, (2) analisis regresi berganda, dan (3) analisis SWOT.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Desa dan Profil Petani di Wilayah Tertinggal

4. Desa tertinggal di Kabupaten Garut dan Sukabumi terletak di wilayah lahan kering, jauh dari ibukota kecamatan serta infrastruktur jalan yang sangat terbatas. Desa tertinggal di wilayah di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu merupakan daerah sawah irigasi, infrastruktur jalan relatif baik, dekat dengan

ibukota kecamatan, namun memiliki sumber daya manusia terbatas. Desa tertinggal di wilayah di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah lahan gambut, infrastruktur jalan terbatas, jauh dengan ibukota kecamatan, serta memiliki sumber daya manusia terbatas.

5. Rata-rata umur petani contoh adalah 48 tahun, dengan tingkat pendidikan formal kurang dari 7 tahun. Rata rata jumlah anggota keluarga laki-laki (1,34) yang bekerja dalam pertanian lebih sedikit daripada perempuan (1,53). Banyak tenaga kerja laki-laki beralih bekerja ke bidang nonpertanian seperti menjadi kuli bangunan atau bekerja di sektor angkutan.
6. Kepemilikan aset lahan terutama lahan sawah, rata-rata petani contoh di Kabupaten Barito Kuala relatif luas, yaitu 1,83 ha. Di Kabupaten Lebong rata-rata pemilikan 0,74 ha. Lahan sawah berasal dari warisan orang tua, hibah lahan dari pemerintah seluas 1,5 ha, atau membeli dari petani lainnya. Di Kabupaten Garut dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, petani di wilayah tertinggal memiliki aset lahan sawah rata-rata hanya 0,19 ha dan 0,14 ha.
7. Untuk lahan kering, rata-rata kepemilikan 0,41 ha di Kabupaten Garut dan 0,99 ha di Kabupaten Sukabumi. Untuk desa-desa tertinggal di Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Lebong, peruntukan lahan kering biasanya digunakan untuk budi daya tanaman tahunan. Di lokasi contoh Kabupaten Garut dan Sukabumi, ditemui fenomena petani menggarap lahan perkebunan swasta dan Perhutani untuk ditanami tanaman pangan.
8. Masyarakat di desa tertinggal di Kabupaten Garut dan Kabupaten Sukabumi memelihara ternak ruminansia kecil seperti kambing dan domba. Rata-rata pemilikan ternak ruminansia kecil 4 ekor di Kabupaten Garut dan 1 ekor di Kabupaten Sukabumi. Di desa tertinggal Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu ditemui banyak petani yang memelihara ikan di kolam, namun sangat jarang memelihara ternak ruminansia kecil maupun besar.

Faktor-Faktor yang Dapat Meningkatkan Kapasitas Petani dalam Merespon Berbagai Perubahan Lingkungan Usaha Tani

9. Bappenas tidak terlibat langsung dengan pembangunan daerah tertinggal karena substansi kegiatannya dilakukan oleh kementerian terkait (mitra Bappenas). Dalam implementasi pembangunan (termasuk daerah tertinggal), kendala yang dihadapi adalah masalah koordinasi. Beberapa Kementerian/Lembaga berhubungan dengan petani tetapi boleh dikatakan jarang yang mengkonsolidasikan atau mengkoordinasikan kegiatannya dengan Kementerian Pertanian.
10. Program Pengembangan Penghidupan Secara Berkelanjutan (P2SB) merupakan program nasional yang digulirkan oleh Bappenas, di antaranya dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong dan Seluma, Provinsi Bengkulu.

Tujuan program tersebut langsung ke masyarakat miskin. Tenaga fasilitator berasal dari tenaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bertugas mendata masyarakat miskin.

11. Tenaga penyuluh pertanian yang berstatus sebagai penyuluh PNS sebanyak 27.159 orang, sedangkan 20.253 orang lainnya merupakan penyuluh tenaga harian lepas (THL). Diperkirakan bila tidak ada penambahan jumlah tenaga penyuluh pertanian sampai tahun 2019, maka jumlah penyuluh pertanian Indonesia yang ada hanya sekitar 49 persen. Untuk itu, baik penyuluh PNS maupun THL perlu penguatan akses terhadap *cyber extension* yang didukung oleh energi lokal.
12. Kementan pada tahun 2016 berencana merekrut tenaga penyuluh pertanian swadaya sebanyak 10.000 orang, untuk mengatasi kelangkaan kuantitas maupun kualitas tenaga penyuluh pertanian. Penyuluh swadaya yang direkrut diutamakan dari anggota KTNA yang telah terbukti memiliki komitmen terhadap pembangunan pertanian dan ada proses seleksi.
13. Tujuan merekrut penyuluh swadaya untuk mengawal produktivitas tujuh komoditas utama pertanian pada 2016. Dengan demikian penyuluh swadaya perlu dibekali metode dan teknis maupun substansi inovasi spesifik lokalita melalui kegiatan pelatihan yang memadai sebelum mendampingi petani.
14. Tingkat kapasitas petani di daerah tertinggal tergolong rendah, baik dilihat dari pengetahuan petani terhadap aspek lingkungan pertanian, keterlibatan petani dalam organisasi petani, maupun pengalaman petani dalam mengimplementasikan program pembangunan pertanian.
15. Petani di wilayah tertinggal tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang peraturan pertanian seperti kebebasan memilih jenis tanaman yang dibudi dayakan, adanya undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Keterbatasan jumlah penyuluh menyebabkan intensitas kegiatan penyuluhan relatif rendah, itupun terbatas pada kegiatan pendampingan program pertanian.
16. Pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki petani yang terkait dengan aspek teknis pertanian tergolong sedang. Pengetahuan dan keterampilan petani tentang pengolahan tanah, perbenihan/pembibitan, penanaman, pemupukan, pengendalian hama penyakit, dan panen telah diperoleh secara turun temurun.
17. Sebagian besar di lokasi penelitian keikutsertaan petani, penilaian petani, formulasi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut pengembangan dalam peningkatan kapasitas petani tergolong rendah.
18. Di Provinsi Kalimantan Selatan, beberapa hal yang terkait dengan aspek peningkatan kapasitas yang diperlukan petani, bentuk peningkatan kapasitas menurut petani, peserta peningkatan kapasitas menurut petani, persepsi petani terhadap pengaruh aspek kelembagaan, persepsi petani terhadap

pengaruh aspek kepemimpinan, dan aspek peningkatan kapasitas yang akan dilaksanakan dan dilanjutkan petani tergolong sedang.

19. Faktor-faktor yang secara nyata berpengaruh positif terhadap keikutsertaan petani dalam peningkatan kapasitas petani di lokasi penelitian adalah hubungan petani dengan kekuasaan, manfaat utama keikutsertaan petani dalam organisasi, pengalaman petani dalam implementasi program pembangunan pertanian, dan keterampilan petani dalam penerapan teknis pertanian
20. Semakin erat hubungan petani dengan pemimpin formal seperti kepala desa, aparat desa/pamong, pemimpin informal seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, ataupun petugas dinas teknis maka kecenderungan petani untuk ikut dalam peningkatan kapasitas petani, semakin tinggi. Kondisi ini menunjukkan lemahnya sikap adaptif petani, dominasi kepentingan politik praktis, dan ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah.
21. Faktor-faktor yang secara nyata berpengaruh positif terhadap keikutsertaan petani dalam monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas petani di lokasi penelitian adalah pengetahuan petani tentang peraturan pertanian, hubungan petani dengan kekuasaan, keikutsertaan petani dalam organisasi petani, pengalaman petani dalam implementasi program pembangunan pertanian, dan pengetahuan petani tentang aspek teknis pertanian.

Strategi Peningkatan Kapasitas Petani untuk Mengakselerasi Pembangunan Pertanian di Wilayah Tertinggal

22. Peta kinerja peningkatan kapasitas petani di daerah tertinggal Jawa Barat berada pada kuadran III. Kondisi tersebut kurang kondusif, yaitu dicirikan oleh dominannya faktor kelemahan internal, meskipun pengaruh peluang eksternal lebih kuat daripada ancaman eksternal. Untuk mengatasi kondisi ini, maka diperlukan upaya memperkuat faktor internal agar mampu memanfaatkan peluang yang ada.
23. Di Provinsi Bengkulu, peta kinerja peningkatan kapasitas petani berada pada kuadran I. Hal ini berarti bahwa kinerja peningkatan kapasitas petani di daerah tertinggal Bengkulu berada pada kondisi yang kondusif, yaitu dicirikan oleh dominannya faktor kekuatan internal dan peluang eksternal. Kondisi ini lebih memudahkan pemangku kepentingan melakukan strategi agresif, yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada.
24. Kinerja peningkatan kapasitas petani di daerah tertinggal Kalimantan Selatan berada pada kuadran IV. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja peningkatan kapasitas petani di daerah ini masih lebih banyak dihadapkan pada hambatan, baik dari kelemahan internal maupun ancaman eksternal. Pada kondisi tersebut, pemangku kepentingan hanya bisa menggunakan strategi defensif, yaitu melakukan pembenahan pada faktor kelemahan internal dan berupaya

mengatasi ancaman eksternal melalui program-program pemberdayaan petani, sebelum bisa menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada.

25. Dengan menggunakan analisis SWOT, diperoleh setidaknya 11 alternatif strategi kebijakan di Jawa Barat, 10 alternatif strategi kebijakan di Bengkulu, dan 11 alternatif strategi kebijakan di Kalimantan Selatan.
26. Berdasarkan hasil penapisan, diperoleh masing-masing empat prioritas kebijakan dalam peningkatan kapasitas petani, terutama dalam kemampuan petani meningkatkan produksi pertanian. Dari empat prioritas di masing-masing provinsi, strategi kebijakan gerakan penerapan inovasi teknologi PTT secara berkelanjutan merupakan prioritas pertama di tiga provinsi contoh.
27. Prioritas lainnya antara lain adalah peningkatan fasilitas dan kesejahteraan penyuluh disertai sanksi pelanggaran disiplin, bimbingan teknis melalui SLPTT, program Demfarm di tiap desa, skim kredit lunak, penerapan HPP, dan peningkatan partisipasi petani dalam pembangunan pertanian.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

28. Penanganan wilayah tertinggal yang menjadi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi masih perlu diintegrasikan dengan baik antarsektor (Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah daerah), bahkan termasuk antarsubsektor dalam sektor pertanian.
29. Perlu ada program khusus pemberdayaan petani untuk meningkatkan kapasitas SDM petani dengan melakukan pembenahan pada faktor kelemahan internal dan berupaya mengatasi ancaman eksternal serta menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Pemerintah Pusat maupun Daerah perlu melakukan penguatan regulasi dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal, yang memungkinkan petani dapat bermitra dengan pihak swasta dalam memasarkan hasil pertanian.